

SKRIPSI

**DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA
KABUPATEN TANA TORAJA, TORAJA UTARA, LUWU
TIMUR DAN LUWU UTARA**

ELSA RETNO VALENTINE



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN TANA TORAJA, TORAJA UTARA, LUWU TIMUR DAN LUWU UTARA

Disusun dan diajukan oleh:

ELSA RETNO VALENTINE

A011171336



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN LUWU TIMUR, LUWU UTARA, TANA TORAJA DAN TORAJA UTARA

Disusun dan diajukan oleh:

ELSA RETNO VALENTINE

A011171336

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan
Makassar, 21 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Agussalim, SE., M.Si.
NIP. 19670817 199103 1 006

Pembimbing II



Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
NIP. 19660717 199103 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si
NIP. 197407152002121003

SKRIPSI

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN LUWU TIMUR, LUWU UTARA, TANA TORAJA DAN TORAJA UTARA

disusun dan diajukan oleh

ELSA RETNO VALENTINE

A011171336

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 Maret 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Agussalim, SE., M.Si.	Ketua	1. 
2. Prof. Dr. Nursini, SE., MA	Sekretaris	2. 
3. Dr. Sultan, SE., M.Si.	Anggota	3. 
4. Randi Kurniawan, SE., M.Sc.	Anggota	4. 



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Elsa Retno Valentine**
Nomor Pokok : A011171336
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA KABUPATEN LUWU TIMUR, LUWU UTARA, TANA TORAJA DAN TORAJA UTARA** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Maret 2023

Yang menyatakan



Elsa Retno Valentine

A011171336

PRAKATA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala izinnya kita masih mampu berjuang untuk menjalani kehidupan hingga saat ini dan karena kasih dan pertolongan-Nya yang begitu besar sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Determinan Ketimpangan Pendapatan Pada Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja dan Toraja Utara.”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka akan menerima kritik maupun masukan dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang diteliti serta membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang mendidik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung Penulis dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu, penulis menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, anugerah dan kasih sayang yang tak hentinya diberikan kepada penulis dalam sepanjang hidup penulis.
2. Kedua orang tua, Esther B. Pakiding dan Arthur Tonapa yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara materil maupun moril kepada penulis sehingga bisa berada di titik ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasi yang diberikan sehingga memudahkan penulis dapat menghadapi segala bentuk rintangan dan proses pendewasaan dalam kehidupan.

3. Poci Gemoi, kesayangan penulis, yang selalu menghibur dan menyemangati penulis.
4. Saudara, Dwiyan Raxy Aditya, dan seluruh keluarga dari papa dan mama yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kepada Dr. Agussalim, SE., M.Si., selaku pembimbing I dan Prof. Dr. Nursini, SE., MA. selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada Dr. Sultan, SE., M.Si. dan Randi Kurniawan, SE., M.Sc. selaku dosen penguji terima kasih untuk segala saran dan perbaikan dan kritik yang membangun selama ujian seminar proposal dan ujian akhir skripsi. Hal tersebut membuat penulis memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru.
7. Pihak departemen Ilmu Ekonomi yang senantiasa memberikan segala bantuan selama proses perkuliahan yang dijalani penulis dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen FEB-UH yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman saya yang ikut turut serta membantu penulis dalam hal apapun, Veralianis Ramadhani, Yolanda Meista Tomina, Amelia Tilana, Ismi Novianti Rasyid dan yang terakhir namun tak kalah pentingnya Faizhal Arfan yang telah membantu dan mendukung perjalanan penulis selama masa perkuliahan dan selalu menghibur dalam keadaan apapun.
10. Kepada teman-teman ERUD17. Terima kasih atas setiap momen kebersamaan yang telah dilewati selama masa perkuliahan dari MABA hingga sekarang.

11. Keluarga besar HIMAJIE yang telah memberikan banyak pengalaman yang sangat berkesan semasa kuliah.
12. Semua pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
13. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena telah menolak untuk menyerah, tetap bertahan dan terus berjuang hingga saat ini.

Makassar, 8 Maret 2023

Penulis,

Elsa Retno Valentine

ABSTRAK

Determinan Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja dan Toraja Utara

Determinant of Income Inequality in East Luwu, North Luwu, Tana Toraja, and North Toraja Regency

Elsa Retno Valentine
Agussalim
Nursini

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi indeks gini di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja Dan Toraja Utara. Faktor-faktor yang digunakan adalah PDRB/kapita, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan data PDRB/kapita, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka selama delapan tahun, sejak tahun 2014 sampai 2021. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa PDRB/kapita berpengaruh negatif terhadap penerimaan ketimpangan pendapatan sedangkan jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap indeks gini . Secara simultan, PDRB/kapita, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh pada indeks gini.

Kata kunci: indeks gini, PDRB/kapita, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka

This study aims to analyze the factors that affect the gini ratio in East Luwu, North Luwu, Tana Toraja, and North Toraja Regency. The factors used were the per capita GRDP, poverty, and unemployment. In collecting data, the researcher used the panel data of per capita GRDP, poverty, and unemployment for eight years, since 2014 until 2021. The data obtained from Central Statistics Agency (BPS). The data analysis method used in this study is panel data regression analysis. The results of this study partially showed the per capita GRDP has negative effect on gini ratio while poverty and unemployemet do not affect the gini ratio. Simultaneously, per capita GRDP, poverty, and unemployment affect the gini ratio.

Keywords: *gini ratio, per capita GRDP, poverty, unemployment*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. Ketimpangan Pendapatan	12
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	20
2.1.3. Pengangguran	22
2.1.4. Kemiskinan	25
2.2. Tinjauan Teoritis	29
2.2.1. Hubungan PDRB/Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan	29
2.2.2. Hubungan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan.....	30
2.2.3. Hubungan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan	31
2.3. Penelitian Terdahulu.....	32
2.4. Kerangka Konseptual	33
2.5. Hipotesis Penelitian	33
BAB III	36
METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	36
3.2. Jenis dan Sumber Data	36
3.2.1. Jenis Data	36
3.2.2. Sumber Data	36
3.3. Metode Pengumpulan Data	37
3.4. Metode analisis penelitian.....	37
3.4.1. Data panel	37

3.4.2. Uji Asumsi Klasik	38
3.5. Estimasi Regresi Data Panel	39
3.6. Definisi Operasional.....	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	43
4.2. Perkembangan Umum Variabel Penelitian	43
4.2.1. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan	43
4.2.2. Perkembangan Perkembangan Produk Domestik Bruto/Kapita	45
4.2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin	46
4.2.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	48
4.3. Pengujian Model Regresi Data	49
4.4. Hasil Estimasi.....	50
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.5.3. Pengaruh PDRB/Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan	55
4.5.4. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Pendapatan	56
4.5.5. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan	57
BAB V	59
PENUTUP	59
5.1. 5.1 Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
Tabel 4.2. Perkembangan PDRB/Kapita empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	45
Tabel 4.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	47
Tabel 4.4. Perkembangan Presentase Jumlah Penduduk Miskin empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	47
Tabel 4.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	48
Tabel 4.8. Hasil Estimasi Regresi.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Indeks Gini di Indonesia.....	4
Gambar 1.2. <i>Pie Chart</i> PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2021....	6
Gambar 1.3. Perbandingan Indeks Gini di Provinsi Sulawesi selatan dan Indeks Gini di Indonesia.....	7
Gambar 1.4. Rasio Gini 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	9
Gambar 2.1. Kurva Kuznet.....	16
Gambar 2.2. Kurva Lorenz.....	21
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian.....	35
Gambar 4.1. <i>Gini Ratio</i> empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
Gambar 4.2. PDRB/Kapita empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	46
Gambar 4.3. Jumlah Penduduk Miskin empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.....	47
Gambar 4.4. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	49
Gambar 4.5. Hasil Uji Normalitas.....	52
Gambar 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Gambar 4.6. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	54
Gambar 4.7. Hasil Uji Autokorelasi.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberanekaragaman yang tinggi, dimana setiap daerah memiliki potensi alam, ekonomi sosial dan budaya yang berbeda-beda. Namun, potensi dan karakteristik sumber daya yang beragam itu juga yang menyebabkan tingkat pembangunan antar daerah di Indonesia menjadi bereda-beda dan tidak merata. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006).

Dua masalah yang umum dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001)

Permasalahan dalam perbedaan sumber daya alam yang tersedia serta kondisi geografis membuat setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Maka tidak heran apabila pada suatu daerah ada yang tergolong daerah yang maju (*developed region*) dan daerah yang tergolong daerah yang terbelakang (*underdeveloped region*)

Karena adanya proses pembangunan di setiap daerah yang akan menimbulkan terjadinya berbagai ketimpangan, maka perlu dilakukan pembenahan dalam membuat suatu kebijakan sehingga tidak akan terjadi lagi ketimpangan di setiap daerah (Sjafrizal, 2012).

Desentralisasi wilayah merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di bidang politik, administrasi, dan fiskal dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 22 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 25 mengatur pembagian sumber-sumber daya *keuangan (financial sharing)* antara pusat-daerah sebagai konsekuensi pembagian kewenangan tersebut. Kedua undang-undang ini menekankan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Selain itu undang-undang ini juga telah memberi kejelasan arah yang ingin dicapai dan memberi keleluasaan bagi daerah melebihi apa yang ada di masa sebelumnya. Meskipun upaya untuk mengurangi kesenjangan telah dilaksanakan dengan menerapkan otonomi daerah serta dengan strategi Trilogi Pembangunan dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, namun pertumbuhan ekonomi yang terus membaik tapi masih meninggalkan permasalahan yang harus dihadapi.

Desentralisasi wilayah merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di bidang politik, administrasi, dan fiskal dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah. Undang- Undang Nomor 22 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 25 mengatur pembagian sumber-sumber daya *keuangan (financial sharing)* antara pusat-daerah sebagai konsekuensi pembagian kewenangan tersebut. Kedua undang-undang ini menekankan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Selain itu undang-undang ini juga telah memberi kejelasan arah yang ingin dicapai dan memberi keleluasaan bagi daerah melebihi apa yang ada di masa sebelumnya. Meskipun upaya untuk mengurangi kesenjangan telah dilaksanakan dengan menerapkan otonomi daerah serta dengan strategi Trilogi Pembangunan dan upaya- upaya lain untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, namun pertumbuhan ekonomi yang terus membaik tapi masih meninggalkan permasalahan yang harus dihadapi.

Oleh karena itu, keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak serta merta dapat menjamin pemerataan ekonomi. Terlebih jika strategi pembangunan ekonomi berorientasi hanya pada pertumbuhan GDP. Sektor ekonomi yang mapan hanya dirasakan kalangan atas menambah daftar panjang angka kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Indonesia. Bahkan secara geografis, pembangunan ekonomi secara masif yang hanya dilakukan di beberapa wilayah pusat pemerintahan juga menjadi salah satu faktor sulitnya pemerataan ekonomi.

Berbagai macam program pemerintah dilaksanakan untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi. Namun hingga kini baik yang terlihat secara langsung (kesenjangan pembangunan yang begitu nyata) maupun secara statistik, perekonomian Indonesia masih relatif timpang (Eka Sastra, 2017)

Berdasarkan penuturan *World Bank* melalui sebagian besar pengukuran, ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2002, terdapat 10 persen warga terkaya di Indonesia yang mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin (World Bank, 2016). Adapun data indeks gini Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1.1. Indeks Gini di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar di atas menunjukkan indeks gini seluruh Provinsi di Indonesia dengan skala 0,262 – 0,434. Daerah yang berwarna merah menunjukkan nilai indeks gini yang mendekati atau sama dengan 0,434. Terdapat 8 Provinsi yang menunjukkan indeks gini dengan nilai mendekati atau sama dengan 0,434, antara

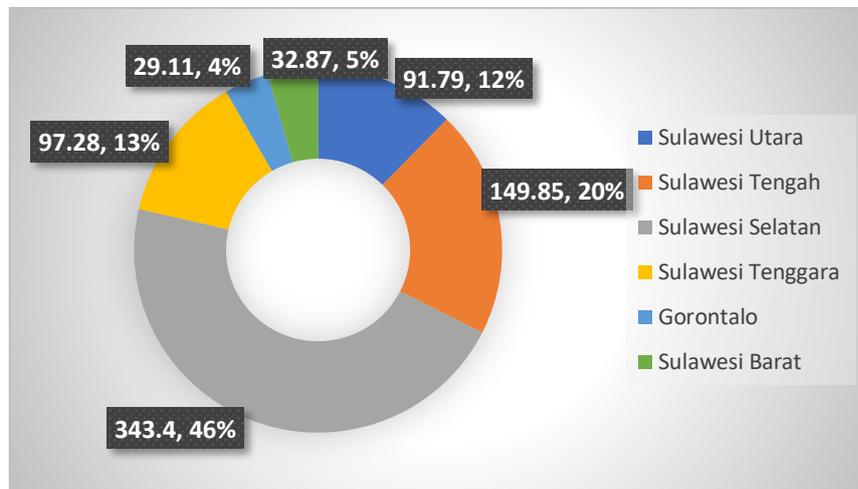
lain, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua.

Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah dapat direpresentasikan dengan melihat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) suatu wilayah. Menurut Sijabat (2019) PDRB merupakan komponen bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Menurut BPS (2010), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah.

Penyusunan PDRB pada suatu daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan informasi tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, kondisi dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah tersebut. Berbagai informasi ini sangat dibutuhkan guna mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh para *decision maker* (pengambil keputusan) mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah

Berikut adalah data PDRB menurut harga konstan di beberapa Provinsi di Pulau Sulawesi.

Gambar 1.2. Pie Chart PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2021 (Triliun Rupiah ; Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan memberi kontribusi sebesar 46% atau sebesar 343,4 triliun rupiah dari total PDRB di Pulau Sulawesi. Dengan kontribusi PDRB tertinggi di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah dengan PDRB tertinggi di pulau Sulawesi sekaligus membuktikan peran strategis Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata untuk kawasan Indonesia Timur.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang diukur dengan PDRB cukup tinggi padahal distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan yang diukur dengan indeks gini relatif timpang. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa di Sulawesi Selatan terjadi ketimpangan pendapatan yang berakibat pada distribusi pendapatan yang semakin tidak merata.

Pembangunan ekonomi suatu wilayah akan dinyatakan berhasil jika terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan

pendapatan. Adapun peningkatan pembangunan ekonomi ialah suatu peningkatan proses ekonomi seperti peningkatan pendapatan perkapita suatu penduduk atau masyarakat di suatu negara atau wilayah yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Gambar 1.3. Perbandingan Indeks Gini di Provinsi Sulawesi selatan dan Indeks Gini di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tren indeks gini di Sulawesi Selatan maupun nasional menunjukkan angka yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Sulawesi Selatan menjadi salah satu Provinsi dengan indeks gini lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks gini nasional. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu dari Provinsi di Indonesia dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi.

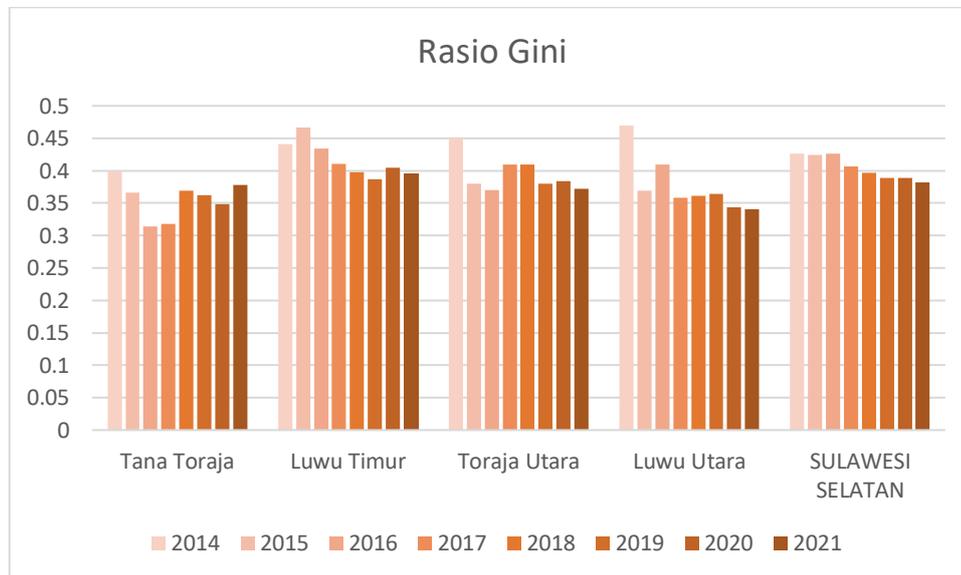
Sofyan (2010) mengemukakan bahwa kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga pada bidang sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan sosial dan kemiskinan yang

nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusuhan dan gerakan separatis. Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Sehingga seringkali di negara-negara berkembang perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal daripada tenaga kerja yang menyebabkan keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan. Ketimpangan pendapatan membatasi masyarakat dengan pendapatan rendah untuk mengakses berbagai kebutuhan dasar hingga membentuk rantai kemiskinan yang berlangsung terus menerus.

Menurut BPS, data untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat menggunakan indeks gini (gini rasio). Indeks gini berbeda dengan indeks theil, dimana Kisaran angka dalam indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini mendekati angka 0 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin rendah (merata) namun ketika mendekati 1 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin tinggi (melebar). Pada Gambar 1.4 menunjukkan angka indeks rasio gini dari beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan 8 tahun terakhir. Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan Indeks Gini. Koefisien gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat, koefisien gini diambil dari nama ahli statistika italia yang bernama C.Gini yang menemukan rumus tersebut tahun 1912. Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (Kemerataan sempurna) sampai 1 (Ketidakmerataan sempurna). Koefisien gini ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36

– 0,49, ketidak merataan tinggi berkisar 0,50-0,70 dan ketidak merataan rendah berkisar antara 0,20-0,35. (Arsyad,2010)

Gambar 1.4. Rasio Gini 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik

Data indeks gini di atas di peroleh dari BPS dengan mengambil beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah dimekarkan. Diagram tersebut menunjukkan tren ketimpangan pendapatan pada tahun 2014 hingga 2021 di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan dimana indeks gini beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Luwu Timur menjadi Kabupaten dengan indeks gini yang terus berada di atas indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2014 hingga 2021.

Menurut Sukirno 2011, semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat menurunkan upah golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Situasi seperti ini yang mengharuskan bahwa lowongan kerja harus disediakan dan harus diciptakan sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja, agar pembagian pendapatan menjadi merata.

Menurut Arsyad (2017) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah. Berdasarkan uraian diatas, serta pentingnya peneliti untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan khususnya pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara, maka peneliti tertarik meneliti topik ini dan memberinya judul “Determinan Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara?
2. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara?
3. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara.

2. Untuk mengetahui apakah kemiskinan berpengaruh terhadap terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara
3. Untuk mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan ilmu terkait ketimpangan pendapatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara
2. Diharapkan bagi masyarakat bahwa hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan secara umum mengenai ketimpangan pendapatan dan pentingnya meminimalisir ketimpangan pendapatan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi optimal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah gambaran dan evaluasi bagi pemegang kebijakan yakni pemerintah agar dapat mengoptimalkan kebijakannya dalam mengambil keputusan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur serta menjadi sumber informasi bagi civitas akademik yang ingin meneliti dengan tema penelitian setopik dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak merata. Sedangkan menurut Baldwin (1986), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan kemakmuran ekonomi antara golongan masyarakat kaya dengan yang miskin, yang tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Sejalan dengan itu, Smith dan Todaro (2006) mengemukakan bahwa pengertian ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat.

Distribusi pendapatan suatu daerah adalah penentu bagaimana pendapatan yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat seperti mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain yang terjadi pada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat namun tidak dibarengi oleh distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tetapi hanya akan menciptakan kemakmuran bagi sebagian masyarakat golongan tertentu.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan suatu masalah besar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Setiap daerah yang melaksanakan pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan

pemerataan kesejahteraan masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih baik jika diikuti dengan pemerataan pendapatan atau hasil-hasil pembangunan yang baik. Hal tersebut mengakibatkan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh lebih banyak lapisan masyarakat, tidak hanya Sebagian golongan masyarakat saja (Widodo, 2006).

Sukirno (2006) menjelaskan terdapat dua konsep mengenai pengukuran ketimpangan pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan di suatu wilayah.

2.1.1.1. Teori Ketimpangan Pendapatan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

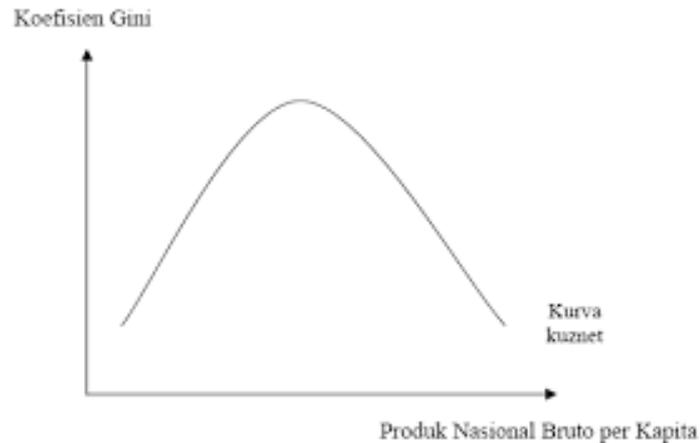
Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Menurut Sukirno (2006), pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Menurut Sukirno (2013), distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana tingkat pendapatan yang diterima seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukirno, 2006). Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” yang dikemukakan oleh Simon Kuznet

tahun 1955. Kuznet (1955) menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata.

Gambar 2.1 Kurva Kuznet



Pada Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari, 4 namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing masing negara (Todaro, 2006). Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan

bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara (Sjafrizal, 2012) Menurut Myrdal (1957), terjadinya ketimpangan regional disebabkan oleh besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi dan akan meningkatkan pendapatan.

Selain itu, Adelman dan Moris dalam Arsyad (1999) menjelaskan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya adalah :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, karena akan menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. inflasi, dimana terjadinya pendapatan uang yang bertambah di masyarakat namun tidak diikuti dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan daerah.
4. Adanya kegiatan investasi yang berasal dari proyek-proyek padat modal, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang akan mengakibatkan peningkatan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan bersama negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan

permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Sementara itu, Todaro (2006) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan yang berdampak pada kemiskinan. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Ada beberapa pengukuran ketimpangan atau ketimpangan pendapatan, diantaranya yaitu :

1. Size of Distribution

Ukuran ketimpangan atau ketimpangan pendapatan yang pertama adalah dengan cara menghitung berapa persentase pendapatan yang diterima oleh 40% persen penduduk yang paling miskin di wilayah tersebut. Selain itu, ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya (Hudiyanto, 2014).

Ukuran ketimpangan atau ketimpangan pendapatan yang pertama adalah dengan cara menghitung berapa persentase pendapatan yang diterima oleh 40% persen penduduk yang paling miskin di wilayah tersebut. Selain itu, ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan membandingkan persentase

pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya (Hudiyanto, 2014).

Adapun kategori dalam mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat ketimpangan termasuk berat apabila 40% penduduk paling miskin menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional.
- 2) Tingkat ketimpangan termasuk sedang apabila 40% penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- 3) Tingkat ketimpangan termasuk ringan apabila 40% penduduk paling miskin menerima diatas 17% dari pendapatan nasional

2. Menurut Bank Dunia

Menurut Bank dunia, ketimpangan atau ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Adapun indikator ketimpangan atau dipasritas pendapatan dari *World Bank* adalah :

- 1) Ketimpangan tinggi apabila 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima lebih kecil 12% dari total pendapatan.
- 2) Ketimpangan sedang apabila 40% berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan.
- 3) Ketimpangan rendah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan.

3. Koefisien Gini

Indeks atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal Kurva Lorenz yang dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks Gini bernilai antara nol hingga

satu. Semakin indeks gini mendekati angka nol maka menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan jika nilai Indeks Gini mendekati angka satu maka menunjukkan adanya tingkat ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006). Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara Jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan sehingga indeks ini akan mengukur tingkat ketimpangan di suatu wilayah secara menyeluruh. Ukuran data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah rumah tangga atau jumlah penduduk
- 2) 2. Rata-rata pendapatan atau pengeluaran yang dimiliki oleh rumah tangga berdasarkan kelasnya.

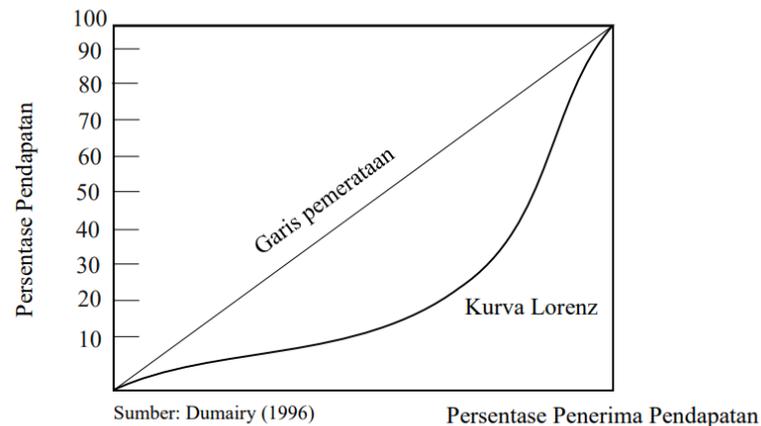
Adapun kategori ketimpangan atau ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan nilai indeks atau koefisien gini adalah :

- 1) Ketimpangan rendah apabila indeks gini di bawah 0,3.
 - 2) Ketimpangan sedang apabila indeks gini diantara 0,3 dan 0,5.
 - 3) Ketimpangan tinggi apabila indeks gini di atas 0,5.
4. d.) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kuva menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan penduduk di suatu wilayah. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang memiliki sisi tegak dan merepresentasikan persentase kumulatif dari pendapatan nasional, sedangkan bagian sisi datarnya merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin baik, sebaliknya jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung)

menunjukkan keadaan yang semakin buruk dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsyad, 1999).

Gambar 2.2 Kurva Lorenz



Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna dari distribusi pendapatan misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horisontal bagian bawah dan sumbu vertikal pada sebelah kanan. Oleh karena itu tidak ada suatu negarapun yang mengalami pemerataan sempurna atau ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatannya, maka kurva-kurva Lorenz untuk setiap negara terletak disebelah kanan kurva diagonal. Jika, semakin tinggi derajat ketidakmerataan kurva Lorenz itu akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horisontal sebelah bawah (Maipita, 2014).

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu 19 wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006).

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang disajikan sebagai berikut:

1. Menurut Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah Provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, 20 Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa.
2. Menurut Pendekatan Pendapatan PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu; pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto.

2.1.3. Pengangguran

Menurut Mankiw dan Wilson (2014) mengukur jumlah pengangguran adalah tugas badan pusat statistik negara yang menghimpun data pengangguran dan aspek-aspek pasar tenaga kerja lain, seperti jenis pekerjaan, jam kerja rata-rata dan durasi pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) negara biasanya mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam salah satu kategori berikut, yakni: bekerja, pengangguran dan tidak termasuk angkatan kerja.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan penyebab pengangguran dan berdasarkan cirinya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran Normal

Pengangguran Normal atau pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi sebanyak dua atau tiga persen. Para penganggur ini tidak bekerja bukan karena tidak memperoleh pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran Siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena tidak stabilnya perekonomian. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi dan hal ini mendorong pengusaha untuk menaikkan produksi. Sehingga banyak pekerja yang dipergunakan dalam proses produksi. Akan tetapi adakalanya permintaan agregat menurun, dengan adanya kemerosotan permintaan

agregat ini mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi pekerjaannya sehingga pengangguran akan bertambah.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: terwujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi, biaya pengeluaran yang sangat tinggi, dan ekspor barang produksi yang menurun dikarenakan adanya persaingan antar negara-negara lain.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Seperti halnya ditentukannya inovasi pada sektor pertanian dan sektor industri. Pengangguran berdasarkan cirinya (Sukirno, 1994) :

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan dalam perekonomian akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu sehingga dikatakan pengangguran terbuka.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran Tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap keadaan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja tergantung pada banyak faktor. Faktor yang perlu

dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh musim hujan atau kemarau. Pengangguran ini banyak terdapat pada sektor pertanian dan sektor perikanan.

4. Setengah Menganggur

Setengah Menganggur adalah pengangguran yang terjadi pada kondisi migrasi dari desa ke kota di negara-negara yang sangat pesat. Sehingga menyebabkan akan terjadi persaingan yang terjadi dalam mencari pekerjaan dan tidak akan mudah untuk memperoleh pekerjaan. Sebagian terpaksa menganggur menjadi penganggur separuh waktu. Disamping itu ada juga yang bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari dari jam kerja normal.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2022). Angkatan kerja adalah penduduk 22 yang berusia 15 tahun atau lebih yang sedang bekerja, pekerja yang sementara tidak bekerja tetapi memiliki pekerjaan, dan pengangguran. Pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja, orang yang tidak punya pekerjaan tetapi sedang mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari kerja, serta orang yang belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (BPS, 2022) :

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

PP = jumlah pengangguran (jiwa)

PAK = jumlah angkatan kerja (jiwa)

2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995).

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 1995: 17). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

1. Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.
2. Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian
3. Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampak mengganggu kesehatan.
4. Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan. Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas). Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan absolut, adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan relative, diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal
3. Kemiskinan kultural, adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
4. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

1. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya

pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 1997: 437). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Todaro, 1997: 437-438):

$$Y_{Per\ Kapita} = \frac{Y_t}{Pop_t}$$

$Y_{Per\ Kapita}$ = Pendapatan per kapita

Y_t = Pendapatan pada tahun t

Pop_t = Jumlah penduduk pada tahun t

Variabel pendapatan dapat dinyatakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional, atau Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan jumlah penduduk menyatakan banyaknya penduduk pada periode t di suatu daerah yang diukur pendapatan per kapitanya

2. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004: 123).

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. Hubungan PDRB/Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu jumlah PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang ada pada daerah tersebut.

Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi suatu daerah, distribusi pendapatan cenderung akan memburuk, kemudian pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan antar daerah akan membaik. Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita suatu daerah dijelaskan menggunakan Hipotesis Kuznets dan yang kemudian sebagai kurva Kuznets.

Kuznets juga mengasumsikan bahwa kelompok masyarakat dengan pendapatan yang tinggi akan memberikan kontribusi modal dan tabungan yang besar sementara kelompok dengan penghasilan rendah hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil. Oleh sebab itu, keadaan seperti akan menimbulkan dampak akumulatif yang akan mengakibatkan memperbesar kesenjangan pendapatan di suatu daerah. Penduduk dengan penghasilan tinggi akan semakin

kaya dan penduduk dengan penghasilan rendah akan semakin miskin (Dao, 2012).

2.2.2. Hubungan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan kemiskinan relatif (Badrudin, 2017). Pengentasan kemiskinan menjadi langkah yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan ungkapan oleh Arsyad (2017) bahwa tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara berkembang semakin meningkat. Kemiskinan menyebabkan pendapatan antara kaya dan miskin semakin timpang. Oleh sebab itu adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut.

Dalam penelitiannya, Hassan dkk (2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang sejalan dengan penelitian Hindun dkk et al (2019) bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemiskinan. Pada hasil pengujian, hubungan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif. Artinya semakin tinggi kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi, atau sebaliknya. Berbeda dengan Afandy et al (2017) yang menyatakan bahwa angka kemiskinan yang semakin rendah justru menaikkan ketimpangan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penafsiran terkait hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut ada yang berhubungan positif, dan juga berhubungan negatif. Pada penelitian ini diharapkan, tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2.2.3. Hubungan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan Mankiw, Quah, & Wilson (2014) mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat menurunkan upah golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi (Sukirno, 2011). Situasi seperti ini yang mengharuskan bahwa lowongan kerja harus disediakan dan harus diciptakan sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja, agar pembagian pendapatan menjadi merata. Memperkuat penjelasan di atas, berikut beberapa penelitian terkait pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian I.Ukpere & Slabbert (2009), pengangguran menambah tingkat ketimpangan diantara masyarakat. Pi & Zhang (2018) mengungkapkan bahwa pengangguran sektoral di sektor terampil perkotaan mengakibatkan ketimpangan upah menjadi lebih luas, jika rasio modal tenaga kerja di sektor ini lebih dari satu. Efriza (2014) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Kemudian, temuan Cysne & Turchick (2012) yang menenukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan uraian di atas, apabila pengangguran semakin meningkat, maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan adalah positif.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah et al (2020) berjudul “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kondisi ketimpangan atau ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola penurunan, yang berarti ketimpangan atau ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin mengecil dan semakin merata. Dilihat dari rata-rata Indeks Williamson wilayah barat memiliki Indeks Williamson terkecil dibandingkan di wilayah timur Sumatera Utara, variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan. Variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara adalah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara yang terakhir adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh Miftahul (2022) dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat PDRB PerKapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021, dapat dijelaskan bahwa koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto PerKapita (PDRB/Kapita) memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Gini).

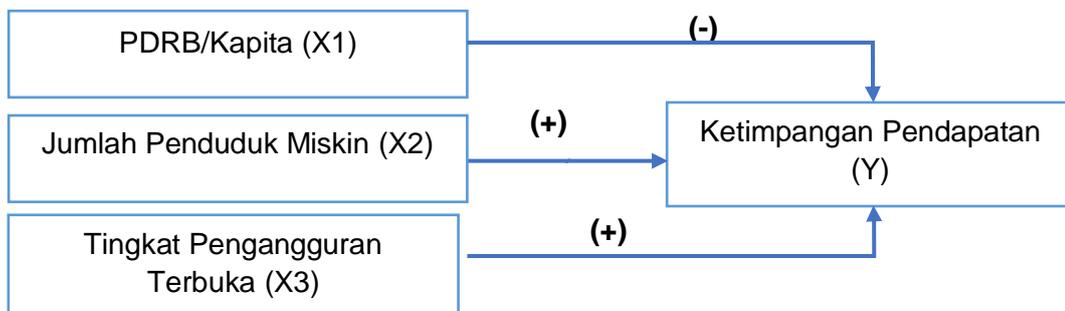
Terakhir adalah penelitian berjudul “Pengaruh PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Kebijakan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Yogyakarta” yang ditulis oleh Windriyanti (2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan jumlah

penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Terdapat perbedaan ketimpangan pendapatan sebelum dan setelah adanya kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa dinilai mampu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Yogyakarta.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual melihat hubungan yang logis antara landasan teori dan kajian empiris dari suatu penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini memuat diantaranya beberapa faktor penting seperti (1) PDRB/Kapita, (2) Jumlah Penduduk Miskin (3) Tingkat Pengangguran Terbuka dan (4) Ketimpangan pendapatan di empat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel-variabel independen dan dependen tersebut akan mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada gambar berikut

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



2.5. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka konseptual penelitian diatas maka hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga PDRB/Kapita (X1) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara.

2. Diduga Jumlah Penduduk Miskin (X2) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara.
3. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) pada Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur Dan Luwu Utara.